

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abu Daud Busroh. 1998. *Pemeriksaan Keuangan Negara*. PT Bina Aksara. Jakarta.

Anggar Slgit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. PT. Buku Seru. Jakarta.

Fajlurrahman Jurdi. 2021. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rangkang Education. Yogyakarta.

Lembaga Administrasi Negara RI. 1992. *Sistem Administrasi Negara RI*, Jilid II. CV Haji Masagung.

Mukarom Zaenal dan Muhibuddin W. 2016. *Laksana, Membangun Kinerja Pelayanan Publik*. Pustaka Setia. Bandung.

Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Setara Press. Malang.

-----, 2012 *Hukum Pelayanan Publik*. Setara Press. Malang.

Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi Pertama. Rajawali Pers. Jakarta

-----, 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Sri Rahayu, Ani. 2010, *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Bumi Aksara. Jakarta,

I Nyoman Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom*

Umar Nain. 2017. *Relasi Pemerintah Desa dan Supremasi dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*. Pustaka Belajar Yogyakarta.

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

SKRIPSI

Hary Mappangara. 2018. *Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Devi Kurniasari. 2020. *Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes Tahun 2018*, Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal.

Muhammad Nur. & Salenda, K. 2021. *Pengawasan Inspektorat Kabupaten Dalam Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam*, Siyastunah Jurnal Ilmiah Islam Siyasah Syariyyah, 2(3), 704-716.

JURNAL

BPK. (n.d.). 2016. *Kajian Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Serta Alokasi Dana*. Jakarta: Direktorat Litbang Ditama Revbang.

Hasniati. 2019. *Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 15±30.

Indonesian Corruption Watch. 2018. Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik. www.Antikorupsi.Org, 6.

KPK, Deputi Bidang Pencegahan. 2015. *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa*. Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Marthen Arie. 2016. *An Approach of Legisprudence Theory to Assess the Quality of Local Regulation*. *Hasanuddin Law Review*, 2(3), 371-384

Santoso, G., Nur, M., Hidayat, S., & Murod, M. 2023. *Transformasi Literasi Informasi Guru Menuju Kemandirian Belajar*. Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra), 02(01), 100–106.

Sulistiyowati, F. MC., Candra R.D. Dan Harisaptaning T. 2017. *PelebagaanPartisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Implementasi Sistem Informasi Desa*. Jurnal APISKOM. Vol. 3, No 2. 215-224.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023

Surat Mendagri No. 700/1281/A.1/IJ, 22 Desember 2016 tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa

Peraturan Bupati Gowa Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Inspektorat Daerah

INTERNET

KBBI edisi V. Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Cnnindonesia.com. 2021. *ICW: Tahun 2021, Aparat Desa Paling Korup di Indonesia*. URL:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912162748-12-693206/icw-tahun-2021-aparat-desa-paling-korup-di-indonesia>
diakses pada tanggal 27 Agustus 2022 pukul 07.32

Jejakfakta.com. 2023. *Gowa Tertinggi Perkara Korupsi Dana Desa di Sulawesi Selatan*. URL:

<https://jejakfakta.com/read/1012/gowa-tertinggi-perkara-korupsi-dana-des-a-di-sulawesi-selatan>
diakses pada tanggal 18 Juli 2023 pukul 09.47

LAMPIRAN

Surat Tugas Inspektorat Daerah saat melakukan Pengawasan ke desa


PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
INSPEKTORAT DAERAH
Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa- 92111

SURAT TUGAS
No.700/ 255 /ST/VIII /INSP/2022

I. **Dasar** : Keputusan Bupati Gowa Nomor :25/II/2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022.

MENUGASKAN :

II. **Kepada** :

1. H. Andy Azis, SH, M.Si	Penanggungjawab
2. Ahmad Junaib, ST	Pengendali Teknis
3. Makmur Alam, S.Sos, M.Si, M.Kes	Ketua Tim
4. Wahyu, ST	Anggota
5. Fatmawaty, SE, MM	Anggota
6. Fauziah Hasyim, SE	Anggota
7. Ince Rahmawati, SE, MM	Anggota
8. Hj. Isnawaty, SE	Anggota
9. Deny Indra Kusuma, SH	Anggota
10. Brahmana Muhammad Ilman, SH	Anggota

III. **Untuk** : Melakukan Pemeriksaan Tower Internet Desa di Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Bajeng dan Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.

IV. **Lamanya** : 4 (empat) hari kerja mulai tanggal 23 s/d 26 Agustus 2022.

V. Agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setelah melaksanakan tugas segera menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Gowa.

Dikeluarkan di Sungguminasa,
Pada tanggal, 22 Agustus 2022
An. **BUPATI GOWA**


H. ANDY AZIS SH, M.Si
Pangkat & Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19720902 199303 1 003

Tembusan:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Peringgal.